

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

(Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)

SKRIPSI



Nama : Kiagus M. Dimas Cattur Raihan

Nim : 222020087

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2025

**ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA PALEMBANG**

(Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Kiagus M. Dimas Cattur Raihan

Nim : 222020087

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2025

Halaman Pernyataan Bebas Plagiat

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiagus M. Dimas Cattur Raihan
Nim : 222020087
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi
Judul : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)

Dengan ini Saya Menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1 di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagian acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang,

Agustus 2025

Kgs.M.Dimas C



Universitas Muhammadiyah Palembang

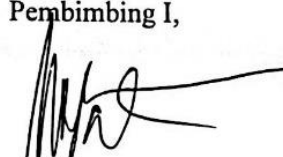
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang)

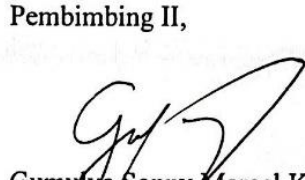
Nama : Kgs. M. Dimas Cattur Raihan
Nim : 222020087
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Pemeriksaan Akuntansi

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal Agustus 2025

Pembimbing I,


Muhammad Fahmi, S.E, M.Si
NIDN : 29097804

Pembimbing II,


Gumulya Sonny Marcel Kusuma, S.E, M.Si
NIDN : 0226068802

Mengetahui,
Dekan

u.b. Ketua Program Akuntansi




Priyanto, S.E, M.Si
NIDN : 0216087201

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang). Skripsi ini penulis ajukan dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti ujian komprehensif pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.

Berdasarkan hasil penelitian Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang untuk terus dapat mempertahankan Pengendalian Internal yang sudah berjalan dengan baik, agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Kiagus H. Riduan, Ibunda Nyimas Hj. Rosmala Dewi, Kakanda M. Rizki Pratama, Kakanda Dwi Sarah Balqis, dan Kakanda Tri Muthiah Maharani yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan

baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, S.E, M.Si, CPA dan Bapak Gumulya Sonny Marcel Kusuma, S.E, M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, disampaikan juga terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Yudha Mahrom DS, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Aprianto, S.E, M.Si dan Ibu Fenty Astiana, SE, M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Welly, S.E, M.Si sebagai koordinator kelas regular B dan Bapak Arraditya Permana, S.E, M.M sebagai sekretaris kelas regular B program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Kombes Pol. Susnadi, S.I.K selaku Komandan Satuan Brimob Polda Sumsel.

7. Bapak AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K, M.H selaku Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Sumsel.
8. Bapak Ipda Jendral din selaku Komandan Kompi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel, periode desember 2024 – juni 2025.
9. Bapak Ipda Zico Novri selaku Komandan Kompi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel.
10. Bapak Ipda Marsel selaku Wakil Komandan Kompi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel, periode desember 2024 – juni 2025.
11. Bapak Ipda Arif Budiman selaku Wakil Komandan Kompi Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel.
12. Bapak Aipda Adi Subroto selaku Danton Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel, periode desember 2024 – juni 2025.
13. Bapak Aipda Fathoni selaku Danton Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel.
14. Bapak Brigadir Dedy Afriansyah selaku Baton Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel, periode desember 2024 – juni 2025.
15. Bapak Brigadir Andre selaku Baton Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Satuan Brimob Polda Sumsel.
16. Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Terimakasih telah memberikan izin, data dan informasi yang mendukung dalam penelitian ini.

17. Terima kasih untuk Nazwa Fadhillah yang selalu ada dan mendukungku dalam suka dan duka. Terima kasih atas dukungan moral, semangat, dan waktu yang telah kamu berikan. Peranmu sangat berarti dalam keberhasilanku.
18. Terimakasih kepada rekan - rekanku di Satuan Brimob Polda Sumsel atas dukungan dan semangatnya, semoga kita semua sukses selalu. Amin Ya Robbal Alamin.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang, 08 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
 BAB II. KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Kepustakaan.....	9
1. Sistem Pengendalian Internal	9
a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal.....	9
b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal.....	10
c. Unsur Sistem Pengendalian Internal	11
d. Prinsip Sistem Pengendalian Internal.....	22
e. Keterbatasan Sistem Pengendalian Internal	23

2. Kualitas Laporan Keuangan.....	25
a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan.....	25
b. Karakteristik Laporan Keuangan	27
c. Penyajian Laporan Keuangan dalam PSAP No.1.....	29
d. Komponen Laporan Keuangan dalam PSAP No.1.....	31
B. Penelitian Sebelumnya	35
C. Kerangka Pemikiran.....	39

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Operasionalisasi Variabel	42
D. Data yang Diperlukan.....	42
E. Metode Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data dan Tahapan Analisis Data.....	44
1. Analisis Data	44
2. Tahapan Analisis Data	45

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....	46
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	46
2. Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang	48
3. Struktur Organisasi	49
4. Tugas dan Fungsi	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	54
1. Sistem Pengendalian Internal	55
a. Lingkungan Pengendalian	55
b. Penilaian Resiko	58
c. Aktifitas Pengendalian.....	61
d. Informasi dan Komunikasi	63
e. Pemantauan.....	65
2. Kualitas Laporan Keuangan	68

a. Relevan	69
b. Andal.....	71
c. Dapat dibandingkan	73
d. Dapat dipahami	75

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA.....85

LAMPIRAN.....87

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya 38
Tabel III.1	Operasional Variabel 49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Palembang	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Tabulasi Data.....	87
Lampiran II Foto copy Hasil Kuisisioner pada Bapenda Kota Palembang	89
Lampiran III Foto copy Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	101
Lampiran IV Foto copy Surat Keterangan Riset dari Tempat Penelitian	102
Lampiran V Foto copy Surat Keterangan Selesai Riset	103
Lampiran VI Foto copy Sertifikat Membaca dan Hafalan Al-Qur'an	104
Lampiran VII Foto copy Sertifikat MYOB for Accounting.....	105
Lampiran VIII Foto copy Sertifikat Pengantar Aplikasi Komputer	106
Lampiran IX Foto copy Sertifikat Pelatihan Audit Tertentu.....	107
Lampiran X Foto copy Sertifikat Pelatihan SPSS	108
Lampiran XI Foto copy Sertifikat Human Resources Management.....	109
Lampiran XII Biodata Penulis	110

ABSTRAK

Kiagus Muhammad Dimas Cattur Raihan/222020087/2025/Analisis Sitem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota palembang (studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang). Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah kota Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Variabel bebasnya adalah system pengendalian internal, variabel terikatnya adalah kualitas laporan keuangan. Populasi penelitian adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. Jumlah reponden sebanyak 4 orang kepala bidang badan pendapatan daerah kota palembang yang terdiri dari bidang bphtb & pbb, bidang pajak daerah lainnya, bidang penagihan, perencanaan dan pembinaan pendapatan daerah serta bidang pengendalian dan basis data pajak daerah. Data primer diperlukan sebagai dasar analisis, sedangkan teknik pengumpulan datanya adalah kuisisioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Pengendalian Internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang sudah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya.

Kata Kunci : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

Kiagus Muhammad Dimas Cattur Raihan/222020087/2025/*Analysis of the Government's Internal Control System in Improving the Quality of Financial Reports of the City of Palembang.*

The research problem formulation is how the implementation of the government's internal control system improves the quality of financial reports of the city of Palembang (case study at the Regional Revenue Agency of the City of Palembang). The aim is to analyze the implementation of the government's internal control system to enhance the quality of financial reports of the city of Palembang. This research is associative, aimed at identifying the relationship between two or more variables and their effects. The independent variable is the internal control system, and the dependent variable is the quality of financial reports. The population of the study consists of employees of the Regional Revenue Agency of the City of Palembang. The number of respondents was 4 heads of departments from the regional revenue agency of Palembang city, which consisted of the BPHTB & PBB department, other local tax departments, the collection department, planning and development of local revenue, as well as the control and local tax database department. Primary data is needed as the basis for analysis, while the data collection technique used is a questionnaire. The analysis method used is qualitative analysis. The results of the study indicate that the Internal Control System at the Regional Revenue Agency of Palembang City is functioning well and is capable of improving the quality of its financial reports.

Keywords: Government Internal Control System, Quality of Financial Reports

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Pernyataan SAP No.1 menjelaskan laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan merupakan salah satu faktor yang menggambarkan kinerja suatu daerah. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi yang berkualitas adalah informasi yang mempunyai keakurasian, kecepatan dan kesesuaian dengan kebutuhan manajemen dan kelengkapan dari informasi yang dihasilkan (Susanto dalam Syaifullah, 2010).

Kualitas laporan keuangan merupakan persyaratan normatif yang harus dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam

informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas Laporan Keuangan perlu didukung dengan Sistem Pengendalian Internal yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dijalankan oleh orang-orang dari setiap jenjang organisasi yang diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan antara pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi (Mulyadi, 2013: 180).

Pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Martini, et al., 2019). Untuk mencapai

pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (selanjutnya disingkat SPIP) yang mengadopsi dari COSO (*Internal Control Framework*) dengan dilakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pemerintahan di Indonesia. SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Kuntadi, 2022).

Pembuatan laporan keuangan secara manual memerlukan waktu yang lumayan panjang sebab keberagaman pelaporan masing-masing perangkat daerah selaku entitas akuntansi. Ada lebih banyak ruang kesalahan dan salah saji dalam akun keuangan karena hal ini. Untuk memenuhi tuntutan keuangan yang terus meningkat dan terciptanya kualitas laporan keuangan yang lebih baik pemerintah daerah didesak untuk membuat program berbasis internet dan intranet untuk membantu pengelolaan keuangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang merupakan suatu sistem usaha atau sistem sosial yang dilakukan instansi yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalan instansi agar bergerak sesuai dengan tujuan dan program instansi dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian internal yang baik sangat bermanfaat bagi manajemen, karena dapat menyediakan data

yang andal serta digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pengendalian internal yang memadai diperlukan untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya aktivitas instansi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian instansi seperti penyelewengan, kecurangan, pemborosan, dan pencurian baik dari pihak internal maupun pihak eksternal instansi dalam menilai instansi serta untuk mengevaluasi dan mengambil tindakan perbaikan dalam mengantisipasi kelemahan instansi (Astuti, 2019).

Kasus fraud korupsi di Indonesia terjadi semakin merata di tingkat pemerintahan pusat sampai dengan daerah dan BUMN/BUMD, dari level eksekutif/CEO, aparatur negara, eksekutif sampai legislatif dan yudikatif. Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 BPK yang memuat 15.674 permasalahan sebesar Rp 18,37 triliun ternyata sebanyak 7.020 permasalahan atau 45%-nya akibat kelemahan Sistem Pengendalian Internal (Achmad, 2022).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 18 pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, termasuk Pemerintah Kota Palembang. Meskipun BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan laporan keuangan, namun lembaganya menemukan sejumlah temuan masalah yang bisa berujung pada kerugian kualitas laporan keuangan. Permasalahan itu terdiri dari 315 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 481 permasalahan, yaitu

pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 141 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 40 permasalahan, administrasi sebanyak 96 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 204 permasalahan. (IHPD Provinsi Sumsel, 2018) Sehingga dapat menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan belum memenuhi sepenuhnya kriteria yang relevan, andal, konsisten, akurat dan tepat.

Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang Kota Palembang berfungsi sebagai unit pelaksana untuk mengkoordinasikan urusan pemerintah dalam bidang keuangan. Selain fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah atau juga dikenal dengan singkatan Bapenda memiliki fungsi dan tugas lainnya. Tugas utama dari Bapenda adalah sebagai badan pengelola pendapatan daerah sesuai dengan asas otomi daerah dan undang-undang yang berlaku. Fungsi Bapenda sendiri ialah penyusun kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah.

Penelitian yang mengenai peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah telah banyak dilakukan, namun masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kualitas laporan keuangan pemerintah. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Rahayuningsih, dkk (2022) menyatakan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap Keandalan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang. Penelitian yang

dilakukan oleh Rita Martini, dkk (2022) menyatakan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Neco Fransisca, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Florencia dan Suji (2023) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi.

Penelitian yang dilakukan oleh Vio Nanda (2024) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Namun, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sri, dkk (2024) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern di Pengadilan Negeri Gorontalo pada bagian keuangan dinilai dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang dan beberapa penelitian sebelumnya isu penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Indonesia masih menggambarkan hasil yang belum konsisten, sehingga

penelitian lebih lanjut untuk masalah ini masih perlu dilakukan. Untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang** (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan oleh penulis bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini untuk mengetahui Analisis Sistem Pengendalian internal Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang).

2. Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada instansi terkait mengenai kebutuhan akan informasi tentang Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad .(2022). *Memperkuat Pengendalian Internal Pemerintah*. Diakses pada 16 Juni 2025, dari <https://news.detik.com/kolom/d-6367819/memperkuat-pengendalian-internal-pemerintah>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. *IHPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019*. Diakses pada 17 Juni 2025, dari https://www.bpk.go.id/assets/files/otherpub/2020/otherpub__2020_1603677805.pdf
- Florencia & Suji. (2023). *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Cimahi*. Indonesian Accounting Research Journal Vol. 4, No. 1, October 2023, pp. 1 – 8.
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang. (2024).
- Mulyadi. (2013). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Neco Fransisca, Aris Eddy, dan Dewi Saptantinah. (2016). *Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784,
- Nur Fadhillah. (2019). *Komponen-komponen Struktur Pengendalian Intern (SPI)*. Diakses 15 Juni 2025, dari <https://e-akuntansi.com/komponen-komponen-struktur-pengendalian-intern-spi/>
- Pemerintah Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2003. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rita Martini. (2022). *Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal*. Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi dan Sistem Informasi (EKSISTANSI) Vol. 11, No. 1, Januari - Juni 2022, 1420-1427.
- Sujarweni. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sri Rahayuningsih, Maria Maria dan Darul Amri. (2022). *Determinan Kualitas Laporan Keuangan Kota Palembang*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 3, November 2022: 90-95.
- Sri Devianti, Hartati Tulib dan Muliyani Mahmud. (2024). *Analisis Sistem Pengendalian Intern dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan*. Jurnal Mahasiswa Akuntansi, Volume 2 No. 4 Maret 2024 Hal. 412-423.
- Tanzil. (2017). *Memahami Keterbatasan Pengendalian Internal*. Diakses 17 Juni 2025, dari <https://jtanzilco.com/blog/detail/841/slug/memahami-keterbatasan-pengendalian-internal>
- Vio Nanda. (2024). *The Influence Of Internal Control Systems, Implementation Of Government Accounting Standards, And Human Resource Competence On Financial Report Quality*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Volume 21/No. 1 Tahun 2024: 24-38
- Wiratna Sujarweni. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi* (Cetakan Pertama). Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wiratna Sujarweni. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Wiratna Sujarweni. (2020). *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.